

# BAWASLU KOTA BLITAR



**BULETIN  
BAWA  
KOTA**



## 2021 CALENDAR

### January

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

### February

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

### March

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

### April

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

### May

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

### June

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

### July

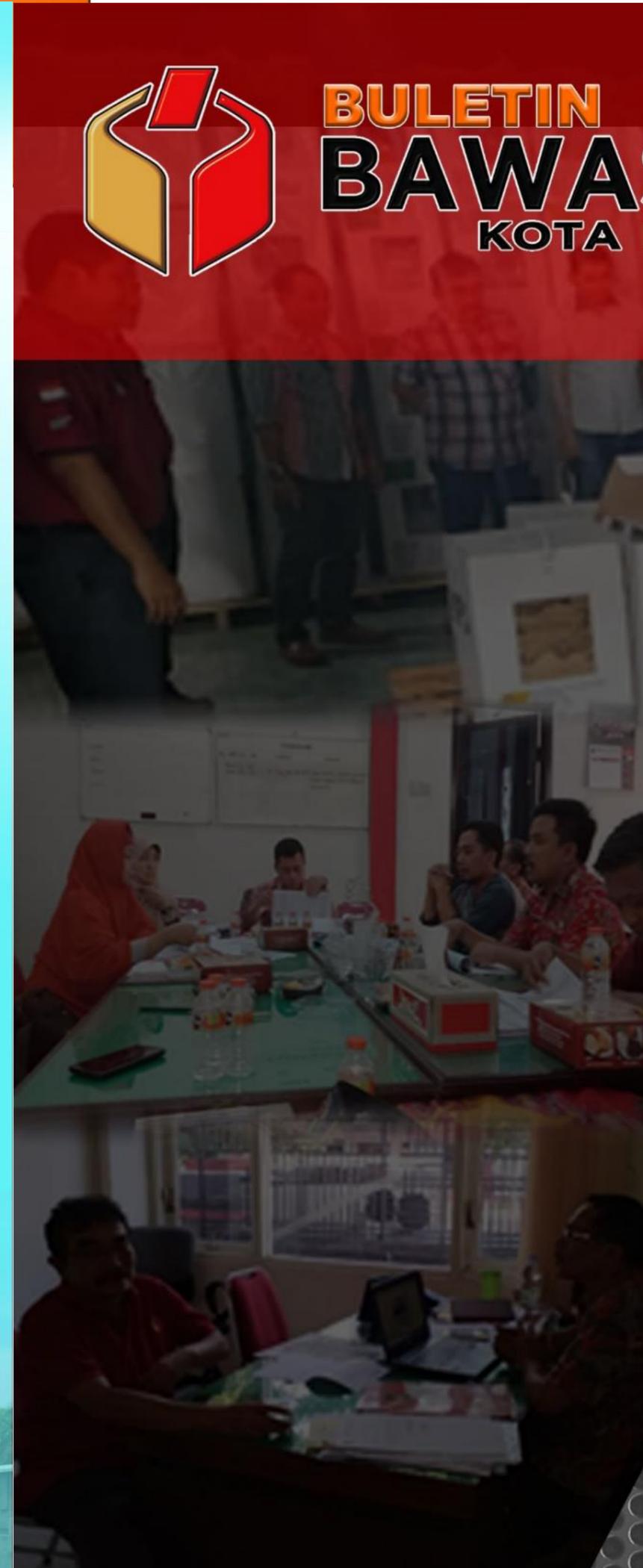
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24

### August

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

### September

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25







Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta Wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131). Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pada Tahun 2020 dilakukan pilkada serentak yang diikuti oleh 270 daerah di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur sendiri pilkada akan digelar di 19 kabupaten / Kota. Pemerintah Kota Blitar sebagai salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk Pilkada 2020 tersebut.

Dawal Tahun 2020, Buletin Bawaslu Kota Blitar edisi pertama ini menyajikan laporan utama tentang Pilkada. Diharapkan tulisan yang disajikan dalam buletin ini dapat menjadi salah satu referensi bagi kita bersama untuk turut berperan aktif dalam menjaga komitmen untuk mewujudkan pilkada yang lebih demokratis dan kondusif.



Buletin Bawaslu ini diterbitkan 6 bulan sekali oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai sarana informasi kepada masyarakat serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu diseluruh Kota Blitar. Terbit setiap enam bulan sekali.

Penerbit :

BAWASLU KOTA BLITAR

Pengarah :

Drs. Bambang Arintoko

Abdul Aziz Al Kaharudin, S.Sos.

Moh. Ridwan

Ihda Rohmawati, S.HI

Penanggung Jawab :

Abdul Aziz Al Kaharudin, S.Sos

Tim Redaksi :

Anik Triana Fatmawati

Wahidiyah Putri Rahayu

Erwin Widhiandono

Sandi Yudha Satriawan

Hasan Asingary

Sigit Setyo Bintoro

Dewi Lestariningsih

Silvi Apriliana Sari

Desain Grafis & Layout :

Jatmiko Mintarjo

Alamat Redaksi:

Sekretariat Bawaslu Kota Blitar

Jalan Tanjung Nomor 109

Kota Blitar, 66122

Telp. (0342-802498)

[www.BlitarKota.Bawaslu.go.id](http://www.BlitarKota.Bawaslu.go.id)



## Sukses Pilkada Kota Blitar Tahun 2020

Kota Blitar menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada Tahun 2020 dengan dasar Undang – undang nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana tersebut pada pasal 22B bahwa salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. Oleh karena itu mengawali tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Bawaslu Kota Blitar bersama KPU Kota Blitar sebagai penyelenggara Pilkada pada Tahun 2020 mengadakan audiensi untuk menyamakan persepsi pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan tahapan demi tahapan pada penyelenggaraan pesta demokrasi untuk masyarakat Kota Blitar yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Sebagaimana

diketahui bahwa meski sama-sama penyelenggara Pemilu Bawaslu dan KPU mempunyai tugas yang berbeda. Pada pelaksanaan di lapangan memang seringkali terjadi benturan kepentingan. Oleh karena itu selain sebagai refleksi dari kinerja pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 lalu, perlu diadakan koordinasi sehingga pada Pilkada 2020, segala perbedaan persepsi dalam regulasi dan pelaksanaannya bisa dicegah. Pada akhir audiensi, kedua penyelenggara sepakat untuk mengadakan koordinasi secara intens baik formal maupun informal dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2020. Sebagai tahap awal persiapan Pilkada 2020, Bawaslu Kota Blitar melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.



*Bawaslu Kota Blitar melakukan pengawasan pada kegiatan buka Kotak Suara dalam rangka pengambilan formulir Model A.DPK-KPU di gudang logistik KPU Kota Blitar.*



Sebagaimana diketahui bahwa KPU harus menggunakan (Daftar Pemilih Tetap) DPT dan (Daftar Pemilih Khusus) DPK Pemilu Tahun 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam kepentingan tersebut Bawaslu harus memastikan bahwa data DPK tersebut harus bersumber dari formulir Model A.DPK-KPU yang berasal dari dalam Kotak suara yang harus dibuka oleh KPU Kabupaten/Kota dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama pihak keamanan dan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, untuk kemudian diupload dalam Sidalih.



*Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dispendukcapil Kota Blitar Imam Muslim terkait update data kependudukan*

Selain itu Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Sebagaimana dijelaskan oleh Komisioner Bawaslu Kota Blitar Abdul Aziz Al Kaharudin bahwa sesuai instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia yang diteruskan secara berjenjang, Bawaslu bertugas untuk mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Dimana dalam langkah pengawasannya diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh data yang benar-benar akurat.





*Komisioner Bawaslu Kota Blitar Abdul Aziz Al Kaharudin, saat memberikan pengarahan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan*

Koordinasi yang dilakukan selain dengan KPU Kota Blitar dan Dispendukcapil Kota Blitar, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Blitar untuk mengetahui apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri /Pengadilan Tinggi/MA yang mencabut hak politik penduduk di Kota Blitar untuk memilih dalam Pilkada 2020 mendatang.

“Dari hasil koordinasi dengan KPU Kota Blitar, data pemilih pada DB 1 sebanyak 1.310 pemilih dan sebanyak 1.225 pemilih hasil buka Kotak suara adalah pemilih DPK yang sudah lengkap dan terupload di Sidalih, hal yang paling utama adalah bagaimana agar hak pilih warga yang dijamin konstitusi itu tidak hilang karena masalah administrasi “

**Abdul Aziz Al**

**Kaharudin**

**Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Blitar**

terang Kordiv Pencegahan dan Hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Blitar Abdul Aziz Al Kaharudin. Lebih lanjut komisioner Bawaslu Kota Blitar ini juga menerangkan bahwa terdapat selisih sejumlah 85 pemilih dimana sejumlah 65 pemilih tidak dapat diupload di Sidalih karena data pemilih tidak lengkap dan sejumlah 22 pemilih tidak terekam dalam A.DPK dan C & hasil buka Kotak suara.



*Komisioner Bawaslu Kota Blitar Moh. Ridwan beserta BPP Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Rohman Ashari pada rapat pembahasan dana hibah pilkada di kantor Satpol PP Kota Blitar*

Persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Blitar juga menyangkut dalam hal anggaran yang selama ini telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Blitar. Sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada 2020 pada pasal 166 bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kota Blitar sebagai salah satu penyelenggara juga sudah mulai menyusun anggaran untuk Pilkada Tahun 2020 yang bisa mendukung seluruh kegiatan Bawaslu Kota Blitar dalam semua

tahapan penyelenggaran Pilkada 2020, untuk kemudian diajukan kepada Pemerintah daerah.

Untuk Pilkada Tahun 2020 ini Bawaslu Kota Blitar berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada yang Bersumber dari APBD mengajukan anggaran sekitar 6 M. Dua kali lipat dari anggaran Pilkada untuk Tahun 2015 lalu. Komisioner Bawaslu Kota Blitar Moh. Ridwan mengatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan realisasi dalam tiga tahap dengan rincian 40 persen di tahap pertama, 50 persen di tahap kedua, dan 10 persen di tahap ketiga," Jelasnya.

Rangkaian Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar kemudian dilanjutkan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, pada dasarnya tahapan ini bertujuan memastikan warga negara yang sudah punya hak pilih sudah terdaftar. Proses pemutakhiran data pemilih dimulai dengan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) oleh KPU Kota Blitar sampai dengan penetapan DPT Tahun 2020 oleh KPU Kota Blitar. Proses diawali dengan pencocokan penelitan PPDP dengan melakukan sensus langsung kepada masyarakat untuk memastikan bahwa warga tersebut masih aktif sebagai warga Kota Blitar. proses berikutnya berlanjut dengan penetapan DPHP oleh PPS dengan total sebanyak 114.895 pemilih, pada tanggal 09 September 2020 KPU menetapkan DPHP menjadi Daftar pemilih sementara Kota Blitar dalam prosesnya Bawaslu Kota Blitar memberikan saran dan perbaikan kepada KPU Kota Blitar yang kemudian menjadi rujukan dari KPU Kota Blitar untuk melakukan pemutakhiran data sebelum ditetapkan menjadi DPT Kota Blitar Tahun 2020. Dalam penetapan DPT Kota Blitar Tahun 2020 sejumlah 114.890 pemilih. Komisioner Bawaslu Kota Blitar Abdul Aziz Al Kaharudin, S.Sos menyampaikan “ada sekitar 578 indikasi pemilih yang masih belum masuk kedalam DPT yang di tetapkan oleh KPU Kota Blitar” Hal ini kemudian mendapat respon baik dari KPU Kota Blitar. **Ninik Sholikhah, S.Pd** Komisioner KPU Kota Blitar memberikan tanggapan. “KPU Kota Blitar akan

menindaklanjuti setiap saran dan perbaikan dari Bawaslu Kota Blitar”.

Pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 kali ini diwarnai dengan adanya tiga bakal pasangan Calon perseorangan dan dua pasangan Calon dari partai politik. Sebelum dinyatakan menjadi pasangan Calon dari jalur perseorangan ketiga bakal pasangan Calon yaitu Lisminingsih dan Drs. EC Teteng, H. Sumari S.Sos dan Edi Widodo dan Purnawan Buchori Dan Indri Kuswati harus memenuhi minimal syarat dukungan bakal pasangan Calon yaitu 10% dari DPT Tahun 2019. Setelah melewati proses pendaftaran bakal pasangan ketiga pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang telah ditentukan. dikarenakan merasa tidak terima akan hasil penetapan tersebut bakal pasangan Calon Lisminingsih dan Drs. EC Teteng mengajukan permohonan sengketa yang selanjutnya diterima dan diproses oleh Bawaslu Kota Blitar dari hasil musyawarah terbuka Bawaslu Kota Blitar menolak permohonan secara keseluruhan. Untuk pasangan dari partai politik dua pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020. Dimana pasangan Calon Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto ditetapkan sebagai pasangan nomor urut satu yang diusung oleh 3 Partai Politik yaitu PKB, Golkar dan PKS serta pasangan Santoso-Tjutjuk Sunario yang ditetapkan sebagai pasangan nomor urut dua

yang diusung oleh 5 partai politik yaitu PDIP, GERINDRA, PPP, DEMOKRAT dan HANURA.

Pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 dimulai dari pencetakan surat suara untuk memenuhi kebutuhan pemilihan sejumlah DPT Tahun 2020 ditambah 2,5% dan surat suara PSU sejumlah 119.888 surat suara.

Setelah melewati prose sortir KPU Kota Blitar memusnahkan sebanyak 559 surat suara. Jumlah itu merupakan surat suara rusak dan kelebihan surat suara untuk Pilwali Kota Blitar 9 Desember.

Pemungutan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota yang berlangsung serentak di 259 TPS di Kota Blitar berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dengan ketat. Selain itu antusias warga Kota Blitar dalam menggunakan hak pilihnya terbilang besar dengan jumlah kedatangan sebanyak 79%. Pemungutan berjalan lancar dan selesai pada pukul 15.00 WIB.

Setelah berakhirnya proses pemungutan suara maka proses berikutnya adalah penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan

secara bertahap mulai dari TPS sampai dengan tingkat Kota. Dalam prosesnya Bawaslu Kota Blitar selalu melakukan pengawasan dan memberikan saran dan perbaikan seperti yang diberikan dalam rekapitulasi tingkat Kota, Bawaslu Kota Blitar memberikan saran terkait jumlah pemilih tambahan. Setelah dilakukan pembetulan, KPU Kota Blitar menyampaikan hasil rekapitulasi di tingkat Kota dengan hasil pasangan Calon nomor urut dua Santoso-Tjutjuk Sunario unggul dari pasangan Calon nomor urut satu Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto dengan perolehan 50.258 dan 37.362 suara.

Pada prosesnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 berjalan baik dan lancar meski ditengah pandemi covid-19 karena Bawaslu Kota Blitar dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan ketat terbukti dengan tidak adanya klaster Pilkada di Kota Blitar.

**-Anik Triana Fatmawati & Sandi Yudha  
Satriawan-**



*Pelatiha Jurnalistik  
Bawaslu Kota Blitar  
di Sam Bistro Cafe*

## BAWASLU KOTA BLITAR GELAR PELATIHAN JURNALISTIK

Bawaslu Kota Blitar menggelar pelatihan penulisan bagi Kehumasan untuk meningkatkan kapasitas penulisan berita di Sam Bistro Cafe, Senin (7/12).

Komisioner Bawaslu Kota Blitar, Abdul Aziz Alkharudin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehumasan Bawaslu Kota Blitar dan Pengawas Kecamatan, yang dalam pelaksanaannya mendatangkan narasumber seorang jurnalis profesional.

“Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penulisan dalam dunia jurnalistik yang diikuti oleh staf Bawaslu Kota Blitar dan staf dari Pengawas Kecamatan” kata Aziz.

Aziz juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan yang diikuti oleh 15 orang ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas penulisan jurnalistik. Sehingga bisa menjadi lebih menarik dari segi tehnik penulisan maupun penggunaan bahasa.

“Tujuan staf Pawascam diikutsertakan dalam kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapastas penulisan dari jajaran Bawaslu maupun pengawas kecamatan” ujarnya.

Tambah Aziz usai mengikuti pelatihan ini diharapkan anggota Bawaslu dan Panwascam se-Kota Blitar bisa mengisi berita di website dan media social Bawaslu Kota Blitar sesuai dengan Kode Etik jurnalistik.

**-Sigit Setyo Bintoro-**



*Monitoring dan evaluasi komisi informasi provinsi jawa timur*

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar menerima kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (02/11/2020). Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik yang berlangsung mulai tanggal 2 sampai dengan 6 November 2020 untuk Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Atasan PPID Bawaslu Kota Blitar Ihda Rohmawati mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini lebih mengedepankan tentang penerapan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2019 yaitu tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan pada pelayanan PPID Bawaslu Kota Blitar: “Beberapa hari yang lalu Bawaslu Provinsi Jawa Timur memang sudah menginformasikan terkait kegiatan Monev yang akan dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu di 19 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada 2020 terutama untuk fungsi-fungsi dari PPID masing-masing

apakah sudah sesuai dengan regulasi atau belum, ”Jelasnya. Lebih lanjut perempuan yang telah dikaruniai dua orang putra ini menambahkan bahwa PPID Bawaslu Kota Blitar memang baru dibentuk secara resmi pada pertengahan tahun 2019, jadi masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan PPID yang membutuhkan penyempurnaan. Adanya kegiatan Monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat memberikan banyak masukan untuk PPID Bawaslu Kota Blitar. Komisi Informasi

Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan ini diwakili oleh Elis Yusniyawati, Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur bidang Penyelesaian Sengketa Informasi beserta PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Ayu Saulina mengapresiasi PPID Bawaslu Kota Blitar yang sebagian besar sudah sesuai regulasi PERKI Nomor 1 tahun 2018. “Pada Monev kali ini kami melihat bahwa PPID Bawaslu Kota Blitar sudah banyak menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan dalam informasi publik, baik secara offline maupun online. Baik di website, sosial media maupun ruangan serta prasarananya sudah cukup bagus dalam mengakomodir tugas dan fungsi PPID,” jelas Ayu Saulina PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa setelah monev ini saran-saran perbaikan segera dilaksanakan, karena informasi publik yang terpenuhi secara maksimal bisa menghindarkan lembaga dalam hal ini Bawaslu Kota Blitar dari sengketa informasi apalagi disaat Pilkada seperti ini.

*-Anik Triana Fatmawati-*



Bawaslu Kota Blitar mengajak masyarakat yang tergabung dalam komunitas di Kota Blitar untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.

Dalam acara ini Anggota Bawaslu Jawa Timur Ibu Eka Rahmawati hadir dan memberikan materi tentang peran pentingnya masyarakat dalam Pemilihan kepala daerah.

“penguatan pengawasan partisipatif pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah salah satu kunci sukses untuk memujudkan

Pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil”

Usaha Bawaslu Kota Blitar dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat ini juga di dukung oleh pemerintah Kota Blitar dan kepolisian Kota Blitar, hal ini disampaikan oleh AKP. Endang Setyawati selaku Kasat Binmas Polres Blitar dan Pempi Yuswanto, SPd Kasubbid Pencegahan dan Penanganan Konflik Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar yang mengatakan mendukung penuh usaha Bawaslu Kota Blitar dalam meningkatkan kualitas Pemilihan di Kota Blitar.

## Sosialisasi Kampung Anti Politik Uang Kota Blitar



*Peresmian kampung anti money politik oleh Bawaslu Kota Blitar dan Stakeholder terkait*

Demokrasi di Indonesia semakin lama semakin lemah karena adanya pesta demokrasi yang diciderai oleh maraknya politik uang (*money politik*), banyak masyarakat menganggap bahwa untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah harus banyak uang, tanpa uang kita tidak mungkin bisa jadi, sehingga prinsip-prinsip semacam itulah yang bisa mengganggu elektabilitas dan akuntabilitas masyarakat yang benar-benar mampu namun takut ikut dalam

kontestasi pemilu maupun pemilihan. Karena demokrasi yang berhasil adalah ketika proses penyadaran masyarakat demikian kuat, yaitu jika awalnya terbiasa dengan politik uang maka selanjutnya akan melakukan perubahan, salah satunya dengan cara tegas menolaknya. Dalam mengembalikan citra demokrasi Indonesia, Bawaslu Kota Blitar mengadakan MOU Kampung Anti Money Politik dengan pemerintah Kelurahan yang ada di Kota Blitar dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh lapisan tokoh masyarakat di masing-masing Kelurahan. Dalam kegiatan tersebut tokoh masyarakat dan tokoh Agama menyambut dengan antusias dan senang hati. Bagi Bawaslu untuk memerangi politik uang memang tidak mudah, namun hal itu harus dilakukan dengan cara bertahap agar seluruh masyarakat sadar terhadap efek negatif, dan ketergantungan terhadap politik uang yang semakin membesar. Praktik politik uang (*money politics*) dapat ditekan melalui strategi- strategi yang baik. Seperti bermitra dengan seluruh stake holder yang ada melalui pengawasan partisipatif dan kampung anti money politik. Agar aktor- aktor politik yang akan bermain money politics dapat sadar dan berpikir ulang. Karena dalam politik uang terjadi tidak dimasa kampanye saja, namun seringkali terjadi pada masa tenang menjelang pencoblosan untuk itu dengan adanya kerjasama dengan stake holder dan seluruh lapisan masyarakat sangat membantu dalam meminimalisir atau mengurangi money politik. Jumlah personil Bawaslu dalam melakukan pengawasan sangat terbatas, sehingga perlu adanya kerja sama dengan menggandeng stake holder dan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan partisipatif dan tidak menerima politik uang. Siapa yang tidak tergiur uang (*money politics*) tapi kalau tidak mulai sekarang diperangi kapan lagi akan hilang mari kita sukseskan Pilkada Kota Blitar yang bersih, jujur, amanah dan bersih dari praktik- praktik politik uang karena dengan politik uang akan membuat pemimpin yang terpilih tidak akan maksimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.

**-Hasan Asingary-**



*Tak Masuk Zona Ppkm Jilid I, Bawaslu Kota Blitar Tetap Patuhi Protokol Kesehatan*

Seiring bertambahnya angka penyebaran virus Covid-19, pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang sebelumnya dikenal sebagai PSBB sebagai upaya menekan potensi penyebaran virus Covid-19. Penerapan PPKM ditekankan kepada wilayah yang telah memasuki zona merah dengan angka penyebaran tinggi. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM, Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: 0002/OT.03/K1/01/2021 tentang Penyesuaian

Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Surat Edaran tersebut dimaksudkan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota yang wilayahnya menerapkan PPKM untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan menetapkan batasan kapasitas jumlah pegawai 25% untuk *Work Form Office* (WFO) dan 75% untuk *Work From Home* (WFH) setiap harinya. Wilayah yang tidak dalam zona PPKM, dihimbau agar tetap

mematuhi protokol kesehatan di wilayah kerjanya. Pada PPKM Jilid I, Kota Blitar tidak termasuk dalam wilayah yang harus menerapkan kebijakan PPKM. Namun, dengan tidak masuknya Kota Blitar dalam zona PPKM Jilid 1 bukan menjadi hal yang dapat disepelekan. Mendukung dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah, Bawaslu Kota Blitar menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan antara lain: menyediakan sanitasi cuci tangan, handsanitizer, thermogun dan melakukan penyemprotan desinfektan pada kantor secara berkala. Selain hal tersebut, keluarga besar Bawaslu Kota Blitar tetap menggunakan masker di wilayah kerjanya. Selaras dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Blitar melakukan penyemprotan desinfektan bekerjasama dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Blitar dan melakukan penyemprotan secara mandiri di setiap harinya sebelum dan sesudah jam kerja.

Tidak hanya diterapkan kepada keluarga Bawaslu Kota Blitar, namun juga menerapkan protokol kesehatan kepada tamu yang hadir. Tamu yang hadir di Bawaslu Kota Blitar dipastikan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki kantor, dan dalam keadaan suhu normal. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kenyamanan, keamanan dan kesehatan dalam bekerja bagi seluruh keluarga besar Bawaslu Kota Blitar serta tamu yang berkunjung ke kantor Bawaslu Kota Blitar.

**-Wahidiyah Putri Rahayu-**



Penerapan Protokol Kesehatan dalam Upaya pencegahan covid-19

## Penyerahan Laporan Pengawasan dan Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahun 2020



*Bawaslu Kota Blitar serahkan Laporan Akhir Pengawas*

Menindaklanjuti undangan Bawaslu Jawa Timur nomor: 040/PM.00.01/K.JI/01/2021 perihal penyerahan Laporan Pengawasan dan Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar menyampaikan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020 bersama dengan 19 Bawaslu Kabupaten/Kota se - Provinsi Jawa Timur. Kegiatan penyampaian Laporan Akhir tersebut diterima langsung oleh anggota Bawaslu RI Mohammad Afifudin di Ruang Rapat Lantai Empat Gedung Bawaslu RI, Jakarta (09/02/2021). Anggota Bawaslu Kota Blitar Abdul Aziz Al Kaharudin menyampaikan sebagai wujud kinerja pengawasan dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020, Bawaslu Kota Blitar mengirimkan laporan akhir pengawasan dengan judul "Dinamika Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020"

Penyampaian Laporan Akhir Pengawasan ini merupakan tindak

lanjut dari Surat Edaran dari Bawaslu RI Nomor : 0936/ K.BAWASLU / PM.00.00 / 2020 tentang penyampaian laporan akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2020, selain itu adanya laporan akhir ini juga bisa sebagai bukti tertulis dari kinerja pengawasan Pilkada Tahun 2020 yang bisa menjadi informasi bagi masyarakat sehingga bisa mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pemilihan kepala daerah," tegasnya.

**-Dewi Lestariningsih-**

## BAWASLU KOTA BLITAR MENGAWAL PEMILIHAN YANG SEHAT DAN JURDIL



*Apel Siaga Penurunan APK yang melanggar*

Kampanye merupakan satu diantara bagian penting dalam komunikasi politik. Kampanye politik dikemas untuk membentuk *personal branding* dan *organizational branding* yang berkaitan dengan kebijakan dan program kandidat atau partai politik. Kampanye ditujukan kepada khalayak publik secara luas untuk mempropaganda pemilih agar tertarik dengan program kandidat yang pada akhirnya menggerakkan pilihan pemilih.

Kampanye yang dilakukan pada masa kampanye saat pemilu atau pemilihan merupakan kampanye jangka pendek. Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, masa kampanye berlangsung mulai tanggal 26 September 5 Desember 2020 atau selama 40 hari. Intensitas dan metode kampanye dilaksanakan dengan memperhitungkan target suara yang ingin dicapai oleh kandidat atau partai politik, karena

kampanye pada pemilihan serentak Tahun 2020 merupakan kampanye 'istimewa' tidak seperti pada kampanye sebelumnya karena pelaksanaan kampanye harus berdampingan dengan pandemi Covid-19. Kampanye yang seharusnya menjadi '*moment*' pasangan calon untuk mendekatkan diri kepada pendukung (konstituennya). Namun dengan mempertimbangkan penyebaran Covid 19, Pemilihan Serentak Tahun 2020 ditunda melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU 6/2020. Pemilihan ditunda selama 3 bulan dan dilanjutkan kembali pelaksanaannya dengan beberapa konsekuensi. Konsekuensi tersebut adalah dilaksanakannya protokol kesehatan agar aktivitas tetap berjalan namun tetap aman dan sehat, istilah tersebut lebih dikenal dengan *new normal*. Sayangnya, penerapan protokol kesehatan tidaklah mudah, mengingat tahapan kampanye merupakan

secara tidak langsung kampanye dapat mempengaruhi pilihan masyarakat serta menentukan hasil pemilihan yang cukup signifikan. Dapat dikatakan dalam tahapan kampanye terdapat beberapa kerawanan terjadinya pelanggaran. Pelaksanaan

tahapan yang rawan dengan pengumpulan masa. Sehingga pelanggaran protokol kesehatan menjadi kerawanan dalam tahapan kampanye.

Realitanya, terdapat beberapa pembatasan dalam pelaksanaan kampanye mulai dari metode kampanye yang digunakan, waktu pelaksanaan tatap muka dan pembatasan jumlah peserta kampanye. Melalui PKPU 11/2020, terdapat metode kampanye yang tidak dapat digunakan oleh pasangan calon, tim kampanye, maupun pihak lainnya yaitu rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, dan peringatan hari ulang Tahun Partai Politik. Seperti yang diketahui bahwa metode kampanye yang tidak dilarang merupakan metode kampanye yang menarik minat massa untuk berpartisipasi dalam kampanye sehingga terjalin komunikasi politik yang baik antara konstituen dan Pasangan Calon. Tidak dapat dipungkiri, pasangan calon harus

memikirkan metode kampanye yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hati para konstituennya. Sehingga dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020, pasangan calon melakukan kampanye dengan menggunakan media sosial, iklan pada media massa dan pelaksanaan tatap muka yang tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. Terdapat 389 kampanye tatap muka yang dilaksanakan oleh pasangan calon, dari keseluruhan jumlah kampanye tersebut terdapat 2 pelaksanaan kampanye yang diberikan Surat Peringatan Tertulis oleh Bawaslu Kota Blitar, hal ini dikarenakan dalam kedua pelaksanaan kampanye telah melanggar ketentuan protokol kesehatan.

Tindakan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar bukan untuk membatasi komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan calon. Melainkan sebagai upaya mewujudkan pemilihan yang sehat dan jujur.

**-Wahidiyah Putri Rahayu-**



*Penurunan APK yang tidak sesuai dengan Peraturan*

## Pengawasan Validasi Desain Surat Suara



*Awasi Pengawasan  
Validasi Desain  
Surat Suara*

Ketua Bawaslu Kota Blitar Drs. Bambang Arintoko bersama Staff divisi PHL Bawaslu Kota Blitar melakukan pengawasan terhadap Proses Validasi materi desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar yang diwakili oleh Edi Saputra S.Pd bersama Staf KPU Kota Blitar di PT. Temprina Media Grafika Malang pada tanggal 11 Nopember 2020. PT. Temprina Media Grafika Malang yang berlokasi di Jalan Raya Papan Dusun Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dengan luas pabrik kurang lebih 3.000 M2, untuk jumlah total karyawan yang bertugas melakukan pencetakan Surat Suara ada 62 orang, jumlah mesin percetakan 4 buah, jumlah mesin plat 8 buah, jumlah alat potong 2 buah jumlah forklift 2 buah. sistem kerja percetakan Surat Suara di PT. Temprina Media Grafika Malang dilakukan selama 24 jam. Berdasarkan estimasi percetakan

Surat Suara khusus Kota Blitar diperkirakan dimulai tanggal 16 November sampai dengan 17 November 2020. Selesai itu untuk menjaga hal keamanan dan kerahasiaan percetakan Surat Suara PT. Temprina Media Grafika Malang menyediakan security dan dibantu oleh Polres Malang PT. Temprina Media Grafika Malang tidak menyediakan gudang khusus untuk penyimpanan Surat Suara dikarenakan setelah proses percetakan langsung dilakukan pensortiran dan pengepakan, selanjutnya dilakukan pendistribusian langsung ke KPU Kota Blitar, gudang diprioritaskan untuk barang cacat produksi dan menunggu hasil keputusan KPU Kota Blitar untuk dimusnahkan.

***-Jatmiko Mintarjo-***

*Evaluasi Pengawas  
Adhoc Kota Blitar*



## **Evaluasi Pengawas Adhoc Kota Blitar**

Berdasarkan Surat Edaran dari Bawaslu Republik Indonesia No 0358 / Bawaslu / SJ / PR.00 / XII / 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilihan Ad Hoc dan Pokja Sentra Gakkumdu, dalam SE tersebut dinyatakan bahwa Masa Tugas Lembaga Ad Hoc dan Pokja Sentra Gakkumdu berakhir pada 30 Januari 2021. Sebelum masa tugas Pengawas Pemilihan Ad Hoc berakhir, Bawaslu Kota Blitar mengadakan beberapa kegiatan, yang pertama Kegiatan Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kota Blitar Tahun 2020 di Tingkat Panwaslu Kecamatan dan Penyerahan SPJ terakhir pada tanggal 08 Januari 2021 yang dihadiri oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, PUMK dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Blitar, yang kedua Rapat Evaluasi Penyerahan Laporan Akhir Panwas Kecamatan se-Kota Blitar pada tanggal 26 Januari 2021 dihadiri oleh Kasek, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Blitar,

ketiga Rapat Evaluasi Kinerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Blitar pada tanggal 30 Januari 2021 yang dihadiri oleh Kasek, PUMK dan seluruh staf pelaksana dan staf pendukung Panwaslu Kecamatan se-Kota Blitar. Bawaslu Kota Blitar mengucapkan terimakasih kepada Pengawas Ad Hoc atas kerja kerasnya dalam mengawal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 sehingga tidak ada cluster Pilkada Tahun 2020. Sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada Jajaran Pengawas Ad Hoc, Bawaslu Kota Blitar memberikan apresiasi berupa penghargaan dan pemberian hadiah kepada Kecamatan Terdisiplin, Terhits, dan Terkompak. Untuk Kecamatan Terdisiplin diraih oleh Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Terhits diraih oleh Kecamatan Sukorejo sedangkan untuk Kecamatan terkompak diraih oleh Kecamatan Kepanjenkidul.

**-Silvi Apriliana sari-**

*Penandatanganan  
 MOU Netralitas ASN  
 dengan Pemkot kota  
 Blitar*



## **BAWASLU KOTABLITAR KAWAL NETRALITAS ASN**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar menggelar kegiatan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak dua kali sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Kota Blitar Tahun 2020 (18/8/2020 dan 22/09/2020).

Dalam rangka menyambut perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kota Blitar mengadakan sosialisasi netralitas ASN yang dilaksanakan di Hotel Puri Perdana Kota Blitar dan di Rumah Makan Bu Mamik.

Pada kegiatan sosialisasi pertama, Bawaslu Kota Blitar mengundang seluruh pimpinan OPD se-Kota Blitar untuk dapat mensosialisasikan asas netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada kepada para pegawai di

OPD nya. Pada kesempatan ini Bawaslu Kota Blitar menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Suyoto serta Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Moh. Amin. Seluruh narasumber yang hadir mengajak dan memotivasi ASN di Kota Blitar untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, karena bersikap netral bagi ASN adalah “wajib” karena ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan pemersatu bangsa.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko yang menjelaskan bahwa sejauh ini angka pelanggaran netralitas ASN di Kota Blitar masih nihil dan semoga dengan adanya kegiatan ini semakin memperkuat pemahaman tersebut.

Lebih jauh Kepala BKD Kota Blitar Suyoto juga menegaskan bahwasanya Pemerintah Kota

Blitar juga sudah memberikan edaran serta himbauan terkait netralitas ASN ke seluruh OPD.

Senada dengan Kepala BKD Kota Blitar, Moh Amin mengatakan bahwa menjaga netralitas ASN memang isu yang ngeri-ngeri sedap bagi seluruh ASN terutama bagi wilayah yang petahananya mengajukan pencalonan kembali.

“Kami mengajak untuk bersama sama menjaga netralitas, tolak money politik , politisasi sara dan berita bohong agar supaya pelanggaran dapat diminimalisir sehingga pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang di Kota Blitar bisa menghasilkan Pilkada aman , tentram dan berkualitas,”

Pada kegiatan yang sosialisasi kedua, Bawaslu Kota Blitar menggandeng Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Blitar dan Kota Blitar dengan sasaran peserta adalah seluruh kepala sekolah TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA/SMK Negeri di Kota Blitar.

Pada kegiatan sosialisasi kedua Bawaslu Kota Blitar melakukan perjanjian dan penandatanganan MOU dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Dalam Acara ini hadir Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh. Amin beliau mengatakan tantangan netralitas ASN dalam masa pandemi makin berat namun hal ini bukan menjadi penghalang dalam upaya menjaga netralitas ASN utamanya di Kota Blitar.

“Adanya pandemi ini memicu banyaknya praktik politisasi bansos dan program pemulihan dampak Covid-19 oleh aktor politik yang berkompetisi. Politisasi program Covid-19 ini kemungkinan besar juga akan melibatkan ASN daerah, serta makin masifnya penggunaan media sosial menjadi salah satu kerawanan namun dengan komitmen bersama untuk selalu saling menjaga netralitas maka kita dapat mewujudkan netralitas ASN di Kota Blitar”. ujarnya.

**-Erwin Widhiandono-**



*Sosialisasi Netralitas ASN antara Bawaslu Kota Blitar dan BKD Kota Blitar*

## BAWASLU KOTA BLITAR AJAK KAUM MILENIAL TOLAK POLITIK UANG

*Sosialisasi  
Pengawasan  
Partisipatif Toloak  
Politik Uang*



Bawaslu Kota Blitar mengajak mahasiswa se-Kota Blitar untuk berpartisipasi dalam mencegah adanya praktek-praktek politik uang yang selama ini sering menjadi perbincangan pada masa pemilu atau pemilihan. Ajakan tersebut diwujudkan dengan melakukan sosialisasi secara langsung yang bertempat di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kota Blitar dan Kampus Universitas Islam Balitar, dalam acara tersebut sekaligus mengundang perwakilan mahasiswa seluruh perguruan tinggi di Kota Blitar.

Kaum Milenial diantaranya mahasiswa merupakan modal dasar dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada serentak, karena mahasiswa merupakan agen perubahan yang dapat memelopori tegaknya demokrasi. Mahasiswa

dinilai mampu untuk menjadi motor penggerak keluarga, teman dan lingkungan sekitarnya untuk menyampaikan nilai negatif dari *money politic*. *Money Politic* atau politik uang merupakan kejahatan yang dapat menjadi bibit korupsi yang sering disebut sebagai *the mother of corruption*. Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok, juga mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Oleh karena itu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berfikiran untuk kepentingan masyarakat.

Upaya represif dalam menindaklanjuti tindak pidana politik uang telah ditetapkan melalui suatu regulasi. Namun upaya tersebut perlu diimbangi dengan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam proses pemilu/pemilihan di Kota Blitar. Menyadari besar peran generasi muda terutama mahasiswa, Bawaslu Kota Blitar mengajak mahasiswa se-Kota Blitar untuk mewujudkan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar yang berintegritas. Gerakan bersama mahasiswa untuk menolak politik uang merupakan bagian dari memberikan pendidikan politik melalui upaya pre-ventif kepada masyarakat secara umum yang bertujuan untuk menumbuhkan pendidikan pemahaman politik di masyarakat.

**-Wahidiyah Putri Rahayu-**



Sosisiasai Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Blitar bersama Milenial di Kota Blitar

## BAWASLU GOES TO SCHOOL



*Bawaslu ajak milenial  
ikut berpartisipasi  
dalam pemilihan*

Pemilih Pemula merupakan pemilih yang baru mendapatkan hak suaranya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020. Pemilih Pemula didominasi oleh pemilih yang berusia 17 tahun pada tahun 2020. Mayoritas pemilih pemula masih menempuh pendidikan di SMA/SMK se-derajat sehingga perlu adanya pendidikan politik sejak dini untuk membentuk generasi emas dan berintegritas. Penting memberikan pemahaman mengenai kerawanan dan pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam proses pesta demokrasi.

Melihat pentingnya hal tersebut, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan sosialisasi di SMAN 3 Kota Blitar, SMAN 1 Kota Blitar dan SMKN 1 Kota Blitar yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh SMA/SMK sederajat se-Kota Blitar dengan pembagian yang telah ditentukan. Mengingat kondisi pandemi, sehingga dibagi menjadi

beberapa tempat yang dilaksanakan secara serentak.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan terkait praktik politik uang kepada Pemilih Pemula, memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran siswa sebagai pemilih pemula serta memberikan pemahaman terkait dengan pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh siswa dalam mewujudkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 yang damai dan berintegritas.

**-hasan Asingary-**



Kota Blitar merupakan kota kecil yang menyimpan banyak sejarah dengan Presiden pertama bangsa ini yaitu Soekarno yang juga disebut dengan Bapak Proklamator Indonesia. Itulah kenapa Kota Blitar juga mendapat julukan Kota Proklamator. Selain kental akan sejarah, Blitar juga memiliki daya tarik berupa wisata kuliner yang beranekaragam. Yang paling

terkenal tentu saja nasi pecel.

Namun kali ini kita akan mengenalkan wisata kuliner lain yang tidak kalah melegenda dari kota Blitar yang wajib dicoba. Sop ayam Bu Murti atau biasa dikenal dengan sop ayam Bungur. Terletak di jalan Bungur Kota Blitar, Bu murti sang empunya warung ini sudah berjualan sejak tahun 1978. Warung yang hanya menyajikan semangkuk sop ayam dengan kuah beningnya yang terasa segar ditambah potongan jeruk nipis ini biasa buka dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 Wib. Disajikan dengan porsi kecil menu ini sangat pas untuk pilihan sarapan pagi. Lokasinya yang dekat dengan pasar dan didekat pusat kota selalu ramai oleh pembeli. Jadi pastikan untuk datang sebelum pukul 10.00 Wib agar bisa menikmati kelezatan sop ayam kampungnya.

## Guyonan Bang Bawas



Seorang wartawan sedang meliput peristiwa kecelakaan. Karena banyak orang yang mengerumuni lokasi kecelakaan, wartawan tersebut tidak dapat menerobos untuk melihat korban dari dekat. Setelah berpikir keras, wartawan tsb dapat ide.

"Minggir-minggir semua, saya ayah korban!" ia berseru. "Saya minta jalan."

Benar saja.... kerumunan itu membiarkan dia lewat. Semua mata terarah kepada wartawan tsb. (wartawan GR, dalam hati: "Berhasil juga!!!) Ketika sampai di tengah kerumunan, ia terpana melihat...

SEEKOR ANAK MONYET tergeletak tak berdaya!



GALERI BAWASLU KOTA BLITAR



Audiensi Bawaslu dan KPU Kota Blitar



Pelatihan Penulisan Jurnalistik



Rapid test Bawaslu Kota Blitar



Sosialisasi Pengawasan Partisipatif TOGA TOMAS



Evalusi Dan Penyerahan Laporan Akhir Pengawas Kecamatan



Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara



Evaluasi Laporan Akhir SDMO



Musyawahar Penyelesaian Sengketa Bapaslon Perseorangan



Pelantikan PTPS



Evaluasi



Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemberdayaan Perempuan



Cangkrukan mengupas budaya politik